

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, Indonesia membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah yang masing-masing diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri (Christia & Ispriyarso, 2019). Gagasan ini diatur dalam UU No. 23/2014 tentang “Pemerintahan Daerah”. Pemerintah daerah memiliki kontrol yang lebih besar atas urusan domestik, termasuk memutuskan bagaimana mengalokasikan pendapatan pajak daerah, retribusi, dan pengeluaran, ketika desentralisasi atau otonomi daerah diimplementasikan. Kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membelanjakan lebih banyak dapat menyebabkan ketimpangan fiskal antara daerah (Fauzi, 2019). Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi ini, pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membantu pembiayaan kebutuhan daerah.

Pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan, terutama di era otonomi daerah ini. Dalam usaha meningkatkan otonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari selisih antara pengeluaran rutin dan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber keuangan yang signifikan bagi daerah. PAD berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan dikelola oleh pemerintah daerah (Fitri, Afifah, & Ka, 2023).

Dengan adanya otoritas daerah, pemerintah setempat dapat memanfaatkan potensi sumber keuangan lokal dan menentukan cara pengalokasian sumber daya untuk belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penemuan sumber keuangan lokal akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dimanfaatkan untuk membangun

infrastruktur dan fasilitas publik yang memerlukan pengeluaran modal yang lebih besar (Arwaty & Hadiati, 2013).

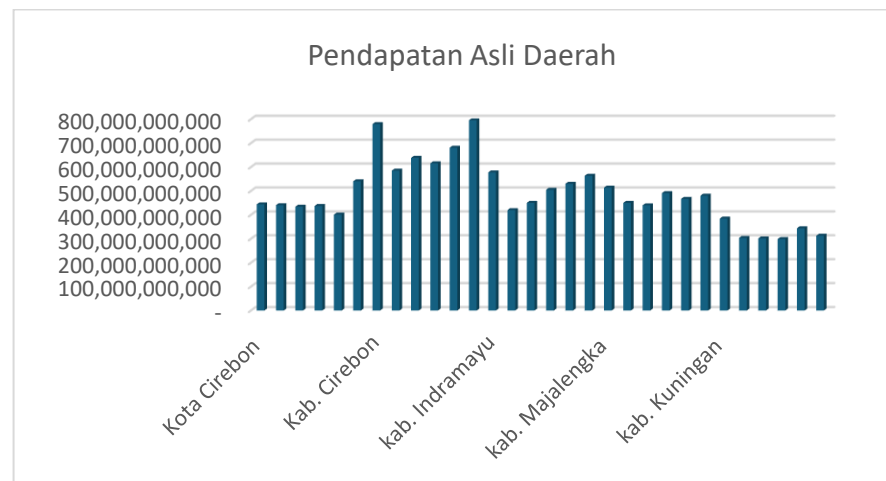
Kemampuan keuangan daerah merupakan indikator utama dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah. Agar suatu daerah dapat dianggap ideal dalam konteks otonomi, penting untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga mereka mampu mengelola keuangan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan kewenangan di daerah masing-masing (Patarai, 2018). Dengan demikian, memaksimalkan kemampuan keuangan daerah otonom sangatlah vital bagi keberhasilan otonomi itu sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil yakni dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada atau dengan mengidentifikasi sumber-sumber baru yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, sembari tetap mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi setempat.

Menemukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan utama yang dihadapi bagi setiap pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dalam pelaksanaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang lebih luas. Meskipun masih terdapat ketimpangan dalam pembangunan dan fiskal yang cukup tinggi, hal ini umumnya disebabkan oleh hubungan yang lemah antara dana yang diterima dan hasil atau pencapaian yang diperoleh. Kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara pemerintah pusat menghadapi kesulitan ketika mengawasi pemanfaatan dana tersebut (Kawulur et al., 2019).

Setiap tahun, peningkatan volume pembangunan, bersama dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, menciptakan tantangan dan beban pembangunan yang perlu ditangani

dengan serius. Dalam menghadapi masalah ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah pusat mempunyai kesanggupan untuk menggalang dana pembangunan melalui berbagai sumber pendapatan negara. Namun, pembiayaan daerah ketergantungannya masih sangat besar pada alokasi yang diberikan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah sering kali kesulitan mendapatkan sumber pendapatan sendiri (Amin, 2019).

Dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berdedikasi dalam mencapai otonomi yang nyata dan akuntabel. Salah satu inisiatif pemerintah dalam hal ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang “Pajak Daerah”, yang mengalami beberapa pembaruan untuk memastikan penerapannya sesuai dengan kondisi dan tuntutan yang berkembang. Melalui perubahan ini, pemerintah berupaya menyediakan kerangka hukum yang lebih kuat dan fleksibel bagi daerah dalam mengatur pajak dan retribusi mereka sendiri. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah meliputi dana perimbangan, PAD, dan pendapatan sah lainnya (YULIANTI, 2009). Komponen utama PAD diantaranya pendapatan asli daerah secara sah, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu. Elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam sistem keuangan daerah, karena menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai layanan publik dan program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber: “Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)”

Menurut informasi yang terdapat dalam Gambar 1.1, Di wilayah Ciayumajakuning, penerimaan PAD dalam periode 2017-2022 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun terdapat beberapa tahun di mana pendapatan tersebut meningkat, pertumbuhan tersebut tidak harus diimbangi dengan perkembangan belanja modal yang sebanding. Hal ini bisa mengindikasikan dua hal: pertama, kemungkinan pendapatan asli daerah yang masih rendah, atau kedua, alokasi dana yang tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dengan demikian, ini menunjukkan ketidakmampuan dalam mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik yang seharusnya dapat dibiayai oleh PAD. Di sisi lain, peningkatan PAD yang signifikan biasanya mencerminkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja tanpa bergantung pada sumber pembiayaan lainnya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa beberapa daerah, termasuk Ciayumajakuning, masih menghadapi tantangan besar terkait kecukupan PAD. Hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi antar daerah, sehingga tidak semua wilayah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan PAD yang memadai guna memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Perbedaan potensi pendapatan asli daerah (PAD) antar wilayah ini menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal yang signifikan di antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan belanja mereka tanpa terlalu bergantung pada sumber daya lain. Sementara itu, daerah dengan PAD rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya (Harianto & Adi, 2007).

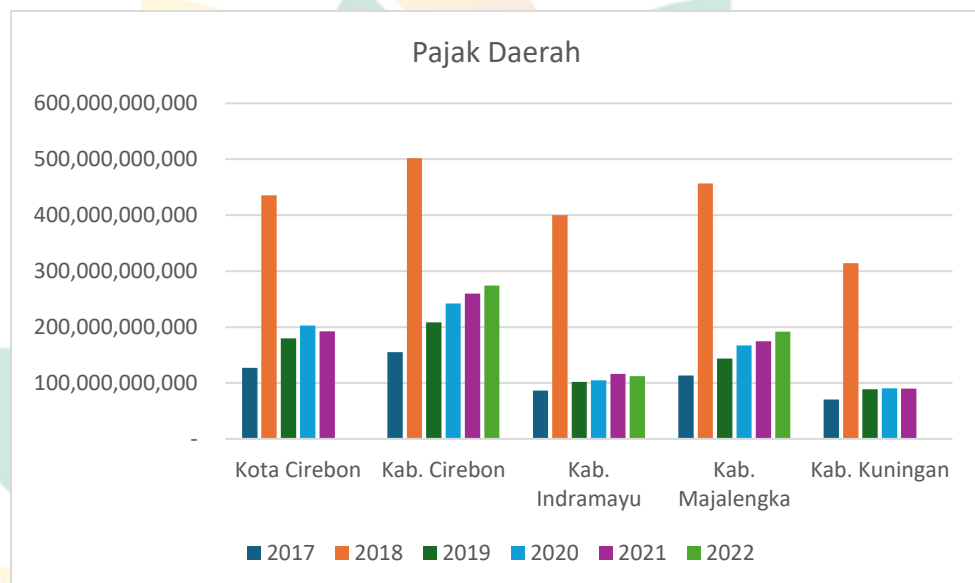
Berdasarkan UU N0. 28 tahun 2007 “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak reklame, restoran, hotel, hiburan, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, biaya akuisisi lahan, bangunan dan tanah, selain biaya pembelian tanah adalah contoh-contoh pajak daerah.



Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: “Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)”

Menurut Gambar 1.2, Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam realisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Ciayumajakuning antara tahun 2017 sampai 2022. Kabupaten Cirebon mencatatkan angka penerimaan pajak tertinggi, sementara Kabupaten Indramayu menunjukkan penerimaan yang lebih rendah dan cenderung fluktuatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Di sisi lain, Kabupaten Majalengka dan Kuningan meskipun tidak mencapai angka penerimaan setinggi Kabupaten Cirebon, namun memperlihatkan stabilitas yang lebih baik. Fluktuasi dalam penerimaan pajak daerah ini sangat berdampak dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Ciayumajakuning. Penurunan penerimaan pajak daerah dapat berdampak negatif pada PAD, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kelangsungan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menjaga stabilitas dan konsistensi penerimaan pajak daerah agar PAD tetap terjaga dan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan.



Gambar 1.3 Target Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : "Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)"

Menurut Gambar 1.3, Fluktuasi dalam target penerimaan pajak daerah di wilayah Ciayumajakuning juga cukup signifikan. Berbagai faktor dapat menyebabkan fluktuasi ini, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan perpajakan, faktor musiman, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta ketergantungan pada sumber daya alam. Tantangan dalam administrasi dan pengawasan pajak juga berpengaruh terhadap kestabilan penerimaan. Semua faktor ini bisa menciptakan ketidakpastian dan perubahan dalam jumlah pajak yang diterima pemerintah daerah.

Pajak daerah menjadi subjek yang menarik untuk dikaji, hal ini karena fluktuasinya yang sering terjadi, serta perannya yang sangat vital sebagai sumber pendapatan bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan dan pembangunan dalam konteks Otonomi Daerah. Realisasi anggaran pajak daerah setiap tahunnya tidak dapat dijadikan ukuran pasti keberhasilan pemungutan pajak. Oleh karena itu, penting untuk menghitung efisiensi dan peran pemungutan pajak daerah dalam mendukung pemerintahan daerah dalam mengevaluasi keberhasilan tersebut. Dengan cara ini, peningkatan keuangan daerah dapat dicapai melalui optimasi penerimaan pajak daerah yang diurus secara baik, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Ciayumajakuning dapat dimaksimalkan. Penentuan seberapa efektif dan besar kontribusi PAD wilayah Ciayumajakuning sangatlah penting (Lohonauman, 2016).

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah di wilayah Ciayumajakuning, mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, dengan fokus khusus pada kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD menjadi bagian dari daerah otonom. Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang sudah diuraikan di atas, dan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, penulis ingin melaksanakan penelitian ini dengan mengambil judul berikut **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN**

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH CIAYUMAJAKUNING TAHUN 2017-2022”.

B. Identifikasi Masalah

1. Penerimaan pajak daerah di wilayah Ciayumajakuning, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi stabilitas pendapatan asli daerah (PAD) dan berdampak pada kelangsungan pendanaan program-program pembangunan daerah.
2. Sistem pemungutan pajak daerah yang diterapkan di wilayah Ciayumajakuning masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pemungutan agar pajak daerah dapat terserap dengan lebih optimal.
3. Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang signifikan pada total pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah Ciayumajakuning. Peran pajak daerah sangat penting dalam mendanai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah, sehingga kestabilan serta peningkatan penerimaan pajak sangat diperlukan demi kelancaran operasional dan pembangunan daerah.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah di Ciayumajakuning terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2017-2022.

2. Penelitian ini hanya fokus pada data dan informasi terkait penerimaan pajak daerah dan PAD di Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022?

E. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Ciayumajakuning periode tahun 2017-2022.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi tambahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada pegawai atau karyawan serta pihak-pihak terkait, mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang kebijakan publik dan administrasi pajak, khususnya terkait efektivitas pemungutan pajak daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa atau yang terkait dengan kebijakan fiskal dan otonomi daerah.
- b. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah.
- c. Pemerintah wilayah Ciayumajakuning dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengevaluasi program pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diterapkan. Temuan dari penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kampanye atau program edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi, yang akan meningkatkan partisipasi warga dalam membayar kewajiban mereka. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah mendapatkan sumber daya lebih besar untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik, yang akan

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dikaji dan sistematika penulisan agar dapat membantu pembaca memahami penelitian ini. yang terdiri dari lima bab substansi, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: mendefinisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

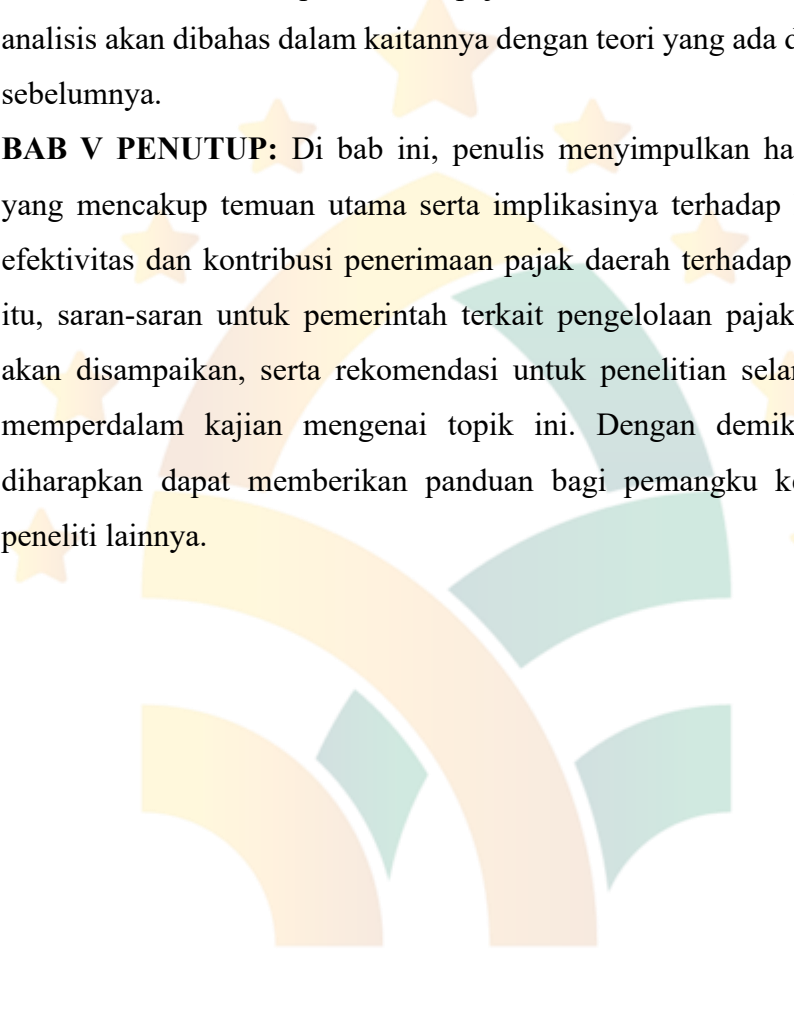
BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Menyajikan konsep pajak daerah, definisi dan jenis-jenis pajak daerah, serta landasan hukum yang mengaturnya. Juga dibahas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), komponen PAD, serta peran pajak daerah dalam PAD. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang efektivitas pajak daerah, bagaimana ukuran efektivitas, serta kontribusinya dalam konteks penerimaan pajak daerah. Di bagian ini juga akan dicantumkan penelitian terdahulu sebagai tinjauan terhadap studi sebelumnya yang berkaitan antara efektivitas dan kontribusi pajak daerah, serta disajikan kerangka pemikiran yang menyertakan diagram atau model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Memuat informasi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD wilayah Ciayumajakuning, di mana data diambil dari tahun 2017 hingga 2022. Jenis data yang dipergunakan yakni data sekunder, termasuk laporan keuangan daerah serta data penerimaan pajak dan PAD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, sementara analisis data menggunakan pendekatan regresi data panel, yang mengintegrasikan data dari berbagai waktu dan lokasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN: Menyajikan gambaran umum tentang

wilayah Ciayumajakuning, mulai dari kondisi geografis, demografis, hingga ekonomi. Di dalam bab ini juga akan dianalisis efektivitas penerimaan pajak daerah serta kontribusi penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD. Hasil analisis akan dibahas dalam kaitannya dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP: Di bab ini, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang mencakup temuan utama serta implikasinya terhadap hasil analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Selain itu, saran-saran untuk pemerintah terkait pengelolaan pajak daerah juga akan disampaikan, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna memperdalam kajian mengenai topik ini. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemangku kebijakan dan peneliti lainnya.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON